

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada tanggal 16 November 2012 lahir karena didasarkan pada negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Melalui Undang-Undang ini, setiap warga negara perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan “Ketahanan Pangan”, yaitu kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan “Keamanan Pangan”, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan sampai kerumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan menangani kerawanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi pangan didalam negeri menuju kemandirian pangan (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mengembangkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk (a) mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan terutama pangan lokal non beras dan terigu guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial (c) mengembangkan keamanan pangan segar didaerah sentra produksi pangan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian secara umum serta pembangunan ketahanan pangan sebagaimana hal diatas, diperlukan dukungan ketersediaan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Pemantapan dan revitalisasi sistem tersebut ditujukan untuk:

1) menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan usaha tani; 2) meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan kompetensi non aparatur pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; 3) mengembangkan kelembagaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat; serta 4) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 –

- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025; dan
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja BKPP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang pangan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui program dan kegiatan bidang pangan;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2018;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016**

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan ( input ), keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 79.429.500,00

- Keluaran

Terlaksananya pertemuan forum penyuluh tingkat desa dan pertemuan koordinasi FMA

Terlaksananya penilaian terhadap FMA, Kelompok Tani dan Gapoktan

- Hasil

Lancarnya pembinaan dan monitoring kegiatan terhadap FMA, Kelompok Tani dan Gapoktan

Adanya usulan FMA, Kelompok Tani dan Gapoktan teladan ke tingkat propinsi dan Pusat.

Terdatanya kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 65.623.000,00

- Keluaran

Terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Hasil

Penanganan rawan pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

b. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 37.525.120,00

- Keluaran

Tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta terjangkau pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu baik jumlah, mutu, aman, keragaman untuk menunjang hidup yang aktif, sehat dan produktif.

- Hasil

Tersedianya pangan dan pasokan pangan sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

c. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 187.166.000,00

- Keluaran

Terkelolanya cadangan pangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

- Hasil

Tertanggulangnya masalah rawan pangan saat/pasca bencana dan gejolak harga.

- d. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 50.775.000,00
  - Keluaran  
Terbinanya lembaga cadangan pangan masyarakat
  - Hasil  
Terlaksananya penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- e. Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)(DAK dan Penunjang)
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp357.610.000,00
  - Keluaran  
Tersedianya bangunan BPK yang representative dan tersedianya sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Kecamatan
  - Hasil  
Lancarnya Operasional BPK  
Meningkatnya kinerja Penyuluh di Lapangan
- f. Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan kecamatan (Penunjang dari DAU)
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 17.379.800,00
  - Keluaran  
Tersedianya biaya operasional pembangunan Balai Penyuluhan Kecamatan.
  - Hasil  
Terwujudnya sarana dan prasarana untuk Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK).

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 45.953.000,00

- Keluaran

Tersedianya Buku Analisis Neraca Bahan Makanan

- Hasil

Tersedianya informasi untuk penyusunan kebijakan dan program

b. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM )

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 45.728.500,00

- Keluaran

Terlaksananya pembinaan terhadap Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

- Hasil

Berkembangnya kegiatan usaha Gapoktan pelaksana P-LDPM dan telaksananya distribusi pangan kepada masyarakat.

c. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 56.873.840,00

- Keluaran

Pembinaan lanjutan terhadap 23 KWT penerima Bansos

- Hasil

Terwujudnya penganekaragaman pangan masyarakat

d. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tk Produsen dan Konsumen

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 128.298.600,00

- Keluaran

Terlaksananya survey, pemantauan dan sosialisasi tentang keamanan pangan

- Hasil

Terjaminnya mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat

e. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 551.553.600,00

- Keluaran

Terlaksananya kegiatan promosi bidang ketahanan pangan.

- Hasil

Dikenalnya menu B2SA pada masyarakat

Terpromosikannya potensi pangan lokal

Terpromosikannya potensi peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

f. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 104.901.000,00

- Keluaran

Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menyusun

kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 1 kali pertemuan

- Hasil

Lahirnya program dan kegiatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan masyarakat.

g. Penyusunan Pola Pangan Harapan

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 31.564.100,00

- Keluaran

Tersedianya buku Pola Pangan Harapan

- Hasil

Tersedianya acuan dalam pemetaan pola konsumsi pangan masyarakat

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

a. Penyusunan Programa (Tk. Kec. Kab dan Nagari)

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp. 51.361.800,00

- Keluaran

Terlaksananya Penyusunan Programa Kabupaten 1 buah, kecamatan 15 buah serta 182 nagari

- Hasil

Tersusunnya penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten dan Kecamatan Serta Nagari

5. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan / Perikanan / Peternakan

a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan

- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 321.295.500,00
  - Keluaran  
Tersedianya Operasional bagi Penyuluh di lapangan  
Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh  
Tersedianya penilaian terhadap penyuluh, THL dan BPK teladan tingkat kabupaten
  - Hasil  
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Penyuluhan pertanian, teradopsinya teknologi yang ada oleh penyuluh  
Adanya usulan penyuluh, THL dan BPK teladan ke tingkat Propinsi dan Pusat
- b. Training di Balai Penyuluh Kecamatan ( BPK )
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp. 79.200.460,00
  - Keluaran  
Terlaksananya training di BPK
  - Hasil  
Tersosialisasinya teknologi pertanian dan program kerja penyuluh pertanian di BPK

### **2.1.1 EVALUASI KINERJA SASARAN**

Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pangan baru terbentuk pada akhir tahun 2016 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan sampai tahun 2016 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat menunjang terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,91 %.

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan penunjang kegiatan dana tugas pembantuan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan ini walaupun masih belum berjalan baik, tetapi sudah ada perubahan ditingkat kelompok aktifitas yang ditandai dengan adanya kegiatan usaha kelompok pada komoditi-komoditi tertentu yang mulai menampakkan hasil.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,61 %.

Kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sampai tahun 2016 telah dilakukan pembinaan sebanyak 23 unit lumbung pangan Masyarakat di 13 kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

- Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,46 %

Pada Tahun 2016 pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 18 ton sehingga total beras cadangan pangan yang bekerjasama dengan BULOG sebanyak 44,5 ton. Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebaiknya dilakukan secara mandiri, serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan,

kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat ( LDPM ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 97,69 %

Kegiatan ini berupa pemberdayaan 5 Gapoktan yang mendapatkan alokasi Dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 225.000.000,- dari Kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam bentuk dana Dekosentrasi. Kegiatan Gapoktan sebagai lembaga distribusi pangan yaitu pembelian, penjualan, penyimpanan dan pengolahan gabah dan beras. Lembaga distribusi pangan masyarakat juga berperan dalam stabilitas harga pangan saat musim paceklik maupun panen raya. Saat musim paceklik lembaga ini harus dapat menyediakan dan mendistribusi pangan ditingkat masyarakat dan ke pasar-pasar dan menampung hasil panen masyarakat saat panen dengan harga yang wajar dan Gapoktan pelaksana kegiatan ini dengan mitranya dapat bersaing dengan pedagang luar Kabupaten Pesisir Selatan juga berfungsi mempromosikan kualitas beras keluar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan.

- Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,03 %.

Analisis Neraca Bahan Makanan menginformasikan kondisi ketersediaan bahan pangan dan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi penduduk dalam tingkat ketersediaan energi dan

protein dengan perbandingan dari hasil rekomendasi WNPG VIII tahun 2012 dimana tingkat ketersediaan energi perorang minimal 2400 Kkal dan 63 gr protein. Tingkat ketersediaan bahan pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 adalah : Energi 3.698 Kkal (154,08%) dan Protein 84,27 gr (133,76%).

- Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 96,82 %.

Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan merupakan kegiatan yang menjadi dasar dalam penetapan perencanaan kegiatan peningkatan status gizi masyarakat yang dicerminkan dengan nilai skor PPH, untuk tahun 2016 skor PPH berdasarkan data Susenas yang di adjustifikasi didapatkan skor sebesar 72,9%, untuk meningkat skor PPH perlu berbagai usaha seperti Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lomba B2SA, sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga.

2. Terdiversifikasikannya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras.

- Kegiatan Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,39 %.

Kegiatan ini merupakan penunjang/pendampingan kegiatan yang didanai oleh APBN. Pembinaan dilakukan terhadap 24 KWT yang masih menerima dana Bantuan Sosial APBN dan 5 KWT yang menerima Bantuan Sosial APBD Propinsi Sumatera Barat, serta beberapa KWT yang tidak lagi menerima Bantuan Sosial.

- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Konsumsi Pangan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 90,71 %.

Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dimana Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dimana Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan juara I pada tahun 2016 ini dan berhak mewakili Propinsi Sumatera Barat untuk Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional Tahun 2017. Kegiatan ini meliputi Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen

- Kegiatan Percepatan Penanganan Keamanan Konsumsi Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,50 %.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewanitaan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2016 ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Koordinasi dan Tim Tekhnis Keamanan pangan, berdasarkan hasil kegiatan 2016, masih perlu dilakukan peningkatan jumlah kegiatan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan kedepan. Dari hasil kegiatan ini didapatkan kelompok yang telah diberi perlakuan keamanan pangan yaitu sampel pangan segar, sampel jajanan anak sekolah, jajanan porsi, keamanan ikan dan makanan kadaluarsa. Ternyata bagi kelompok yang telah terpilih jadi sampel awal uji didapatkan ada masalah ketidak amanan pangan dan dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan sosialisasi terdapat perubahan perilaku yang positif. Hal ini dibuktikan dengan Bakso yang di uji untuk tahun 2013 dinyatakan mengandung boraks dan setelah dilakukan

sosialisasi tahun 2014 tidak ditemukan lagi boraks pada Bakso yang ada dikecamatan IV Jurai dan Pasar Baru. Untuk jajanan anak sekolah masih ada kandungan zat pewarna yang berlebihan, untuk tahun 2016 telah dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan kepala sekolah tentang makanan jajanan yang aman. Tahun 2016 kecamatan yang aman akan dibina secara terpadu dari berbagai lintas sektor sehingga dapat meningkatkan keamanan pangan.

3. Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan. dalam rangka menyusun kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan. dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 94,52 %.

Dalam rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2016 yang diangkat menjadi tema pembahasan adalah Kebijakan Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan Tingkat Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Terciptanya kemandirian petani dan nelayan.

- Penyusunan Programa (Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 90 %.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistim Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi aspek Kelembagaan, Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyediaan

sarana & Prasarana serta Aspek Pembiayaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) Programa Penyuluhan Pertanian diharapkan dapat menghasilkan kegiatan Penyuluhan Pertanian spesifik Lokalita yang strategis dan mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan Produktivitas komoditas unggulan daerah dan Pendapatan Petani. Dengan demikian Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Programa Penyuluhan Pertanian ini akan mampu merespon kebutuhan Pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap Program-Program Prioritas dinas/Instansi terkait.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/OT.140 /5/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa lembaga/unit kerja yang menangani kegiatan Penyuluhan Pertanian diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan programa Penyuluhan setiap tahunnya.

- Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan capaian kinerja 100 %. dengan realisasi anggaran 96,95 %.

Tugas Utama Penyuluhan adalah membantu petani didalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah, tetapi masalah penyuluhan sekarang adalah kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan, bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. Dinamika petani belum mampu mengikuti perkembangan, kemajuan teknologi dan pelaku usaha dibidang agribisnis terus terjadi, untuk itu perlu melakukan beberapa kegiatan pada tahun 2016 antara lain diantaranya

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, pada kegiatan tersebut fokusnya adalah Unit Pelaksana FMA (Penyuluhan yang dikelola oleh Petani) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu metoda pengembangan kapasitas pelaku utama dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh pelaku utama itu sendiri (*Farmers Managed Extension Activities/FMA*). Metode ini menitikberatkan pada pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku utama dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam metode FMA ini pelaku utama dan pelaku usaha mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada diri, usaha dan wilayahnya, merencanakan kegiatan belajarnya sesuai dengan kebutuhan mereka secara partisipatif dalam rangka meningkatkan produktivitas usahanya guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Melalui kegiatan ini petani difasilitasi untuk merencanakan dan mengelola sendiri kebutuhan belajarnya, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama. Kegiatan ini merupakan penunjang operasional kegiatan FEATI/P3TIP yang bersumberkan dana tugas pembantuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

5. Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan.
  - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 92,66 %.

- Training di Balai Penyuluhan Kecamatan dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,15 %.
- Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( DAK dan Penunjang ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,89%.
- Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) ( Penunjang dari DAU ) dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 95,32 %.

Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) (DAK dan Penunjang) merupakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan sarana Balai Penyuluhan Kecamatan sehingga dalam menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan SKPD dengan petani / nelayan berjalan secara optimal. Sarana BPK yang difasilitasi lewat kegiatan ini adalah :

- Pengadaan Personal Komputer (Laptop) sebanyak 3 (tiga) unit.
- Pengadaan Peralatan Studio Visual (Wireless/Pengeras Suara.
- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor berupa lanjutan pembangunan pagar lahan BPK Lengayang dan Plesteran pagar lahan BPK Lengayang.
- Finishing Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK Silaut)

### **2.1.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 yaitu dengan alokasi anggaran Rp 3.127.230.200.- dan terealisasi Rp 3.006.572.066,- atau tingkat penyerapannya yaitu 96,14%, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3. dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Capaian Keuangan Sasaran**

| Sasaran Strategis                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                       | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                         | ANGGARAN       | REALISASI      | CAPAIAN (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| (1)                                                                                                                                          | (2)                                                     | (3)                                                                                                                                                        | (4)            | (5)            | (6)         |
| Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari | 1 Jumlah . Kelompok Desa Mandiri Pangan                 | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b><br>Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan                                            | 65.623.000,00  | 62.937.070,00  | 95,91%      |
|                                                                                                                                              | 2 Jumlah . kelompok cadangan pangan masyarakat          | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</b><br>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat                          | 47.879.000,00  | 47.691.000,00  | 99,61%      |
|                                                                                                                                              | 3 Jumlah . cadangan pangan pemerintah                   | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</b><br>Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah                                      | 187.166.000,00 | 184.280.450,00 | 98,46%      |
| Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat                                                         | 1 Jumlah . Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat         | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</b>                                                                                       |                |                |             |
|                                                                                                                                              |                                                         | Kegiatan Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat                                                                                                | 48.328.500,00  | 44.674.050,00  | 97,69%      |
| Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan                                                                                             | 1 Jumlah . buku informasi tentang penduduk rawan pangan | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</b><br><br>Kegiatan Analisis Ketersediaan pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan | 45.953.000,00  | 45.506.470,00  | 99,03%      |

|                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan                                       | 1 Jumlah buku informasi tentang penduduk rawan pangan                                | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebuan)</b><br><br>Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, Harga Pangan dan HBKN)                                  | 37.525.120,00         | 37.235.850,00         | 99,23%        |
| <b>Jumlah</b>                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>793.089.500,00</b> | <b>725.889.000,00</b> | <b>91,52%</b> |
| Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan                                       | 1 Jumlah buku informasi tentang penduduk rawan pangan                                | <b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b><br><br>Kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan                                                                                          | 35.451.600,00         | 30.560.250,00         | 96,82%        |
| Terdiversifikasinya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras | 1 Jumlah Kelompok Wanita Tani yang di Bina<br><br>2 Jumlah promosi yang dilaksanakan | <b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b><br>Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan<br><br><b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b> | 56.873.840,00         | 55.957.366,00         | 98,39%        |
|                                                                                        |                                                                                      | Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan                                                                                                                                   | 551.533.600,00        | 500.273.450,00        | 90,71%        |

|                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                   |                       |                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen  | 1 . Peningkatan Pengendalian, penanganan dan keamanan pangan | <b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>                                                                          |                       |                       |               |
|                                                                                                      |                                                              | Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen                                                                                | 128.298.600,00        | 126.372.600,00        | 98,50 %       |
| Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan                  | 1 . Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan                | <b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>                                                                          |                       |                       |               |
|                                                                                                      |                                                              | Kegiatan Pemantapan dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan                                            | 104.901.000,00        | 99.147.500,00         | 94,52%        |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                   | <b>704.218.300,00</b> | <b>663.203.200,00</b> | <b>94,18%</b> |
| Terciptanya kemandirian petani dan nelayan                                                           | 1 . Laporan programa                                         | <b>Program Peningkatan Teknologi Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan</b><br>Kegiatan Penyusunan Programa ( Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari ) | 51.361.800,00         | 51.269.950,00         | 99,82%        |
|                                                                                                      | 2 . Jumlah kelompok FMA                                      | <b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>                                                                                                   |                       |                       |               |
|                                                                                                      |                                                              | Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                                                                                     | 79.429.500,00         | 77.008.700,00         | 96,95%        |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                        |                                                              |                                                                                                                                                   | <b>133.670.000,00</b> | <b>131.506.816,00</b> | <b>98,38%</b> |
| Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan | 1 . Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan       | <b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan</b>                                                                           |                       |                       |               |

|                     |  |                                                                                                                                                            |                         |                         |               |
|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                     |  | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan / Perikanan                                                                          | 310.445.500,00          | 297.704.850,00          | 92,66%        |
|                     |  | Kegiatan Training di Balai Penyuluhan Kecamatan                                                                                                            | 79.200.460,00           | 78.523.500,00           | 99,15%        |
| <b>JUMLAH</b>       |  |                                                                                                                                                            | <b>333.749.100,00</b>   | <b>324.007.500,00</b>   | <b>97,08%</b> |
|                     |  | <b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</b><br>Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan ( BPK ) (DAK dan Penunjang) | 357.610.000,00          | 357.231.000,00          | 99,89%        |
|                     |  | Kegiatan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (Penunjang dari DAU )                                                                               | 17.379.800,00           | 16.565.600,00           | 95,32%        |
| <b>JUMLAH</b>       |  |                                                                                                                                                            | <b>1.162.503.300,00</b> | <b>1.161.965.550,00</b> | <b>99,95%</b> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |  |                                                                                                                                                            | <b>3.127.230.200,00</b> | <b>3.006.572.066,00</b> | <b>96,14%</b> |

### 2.1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD

1. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah.
2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu.
3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin.
5. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
6. Belum terpenuhinya tingkat kecukupan cakupan pelayanan penyuluhan yang diakibatkan minimnya jumlah penyuluh.

7. Belum optimalnya tingkat pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan, khususnya dalam aplikasi metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
8. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha.
9. Masih terdapat alih fungsi lahan produktif usaha sektor pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya.
10. Belum memadainya sarana dan prasarana di tingkat Balai Penyuluhan Kecamatan dan Penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
11. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara SKPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **2.1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah ketahanan pangan merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

### **BAB III**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2018**

#### **3.1 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam Era Otonomi Daerah yang didukung oleh sumber daya alam yang cukup berlimpah agar dapat didayagunakan secara optimal melalui bidang pangan.

Guna mencapai tujuan dan maksud tersebut, Dinas Pangan yaitu ***“Terwujudnya Ketahanan Pangan untuk mendukung kemandirian pangan”***. Makna yang terkandung dalam Visi diatas adalah sebagai berikut :

- Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

- Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermantabat.

Dalam mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kecukupan ketersediaan pangan di masyarakat.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan peran masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan.
- c. Meningkatkan kesadaran terhadap keamanan dan mutu pangan.

### **3.2.1 Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran arah dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2. Untuk memudahkan para pelaksana dalam melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi perencanaan kegiatan-kegiatan.

3. Sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kabupaten.

### **3.2.2 Sasaran**

Rencana Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 ini disusun dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat.
2. Terwujudnya aparatur yang menangani bidang Pangan.
3. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan sinergisitas program dan kegiatan antara Dinas/ Badan yang terkait dengan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **3.2.3 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran.

## **3.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup pencapaian indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021, Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pangan Tahun 2016 yang merupakan tahun ke-1 pelaksanaan RENSTRA Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran s/d Tahun 2016**

| Sasaran Strategis                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                      | 2015                             |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                        | Target                           | Realisasi                                                   |
| (1)                                                                                                                                          | (2)                                                                    | (3)                              | (4)                                                         |
| Terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung / nagari | 1. Jumlah Kelompok Desa Mandiri Pangan                                 | 14 kelompok desa mandiri pangan  | 14 kelompok desa mandiri pangandan 1 kawasan mandiri pangan |
|                                                                                                                                              | 2. Jumlah cadangan pangan masyarakat kampung / nagari                  | 4 Unit Lumbung Pangan Masyarakat | 4 Unit Lumbung Pangan Masyarakat                            |
|                                                                                                                                              | 3. Jumlah kelompok cadangan pangan masyarakat                          | 18 Kelompok Lumbung Pangan       | 18 Kelompok Lumbung Pangan                                  |
|                                                                                                                                              | 4. Jumlah cadangan pangan pemerintah                                   | 18.000 Kg Beras,                 | 18.000 Kg Beras,                                            |
| Tersedianya dan terdistribusinya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat                                                         | 1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat                         | 6 Gapoktan                       | 6 Gapoktan                                                  |
| Tersedianya Data Informasi Penduduk Rawan Pangan                                                                                             | 1. Jumlah buku informasi tentang penduduk rawan pangan                 | 20 Buku NBM                      | 20 Buku NBM                                                 |
|                                                                                                                                              |                                                                        | 20 Buku PPH                      | 20 Buku PPH                                                 |
| Terdiversifikasinya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras                                                       | 1. Jumlah Kelompok Wanita Tani yang di Bina                            | 23 Kelompok Wanita Tani          | 23 Kelompok Wanita Tani                                     |
|                                                                                                                                              | 2. Jumlah promosi yang dilaksanakan                                    | 2 Kali                           | 2 Kali                                                      |
| Meningkatnya pengendalian, penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen                                          | 1. Persentase peningkatan Pengendalian, penanganan dan keamanan pangan | 100%                             | 100%                                                        |

|                                                                                                      |                                                       |                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan                  | 1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan          | 1 Kali pertemuan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                                             | 1 Kali pertemuan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan                                             |
| Terciptanya kemandirian petani dan nelayan                                                           | 1. Laporan programa<br><br>2. Jumlah kelompok FMA     | 1 buah laporan penyusunan programa kabupaten, 15 laporan penyusunan programa kecamatan<br><br>30 FMA | 1 buah laporan penyusunan programa kabupaten, 15 laporan penyusunan programa kecamatan<br><br>30 FMA |
| Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam membina kelompok tani nelayan | 1. Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan | 15 BPK, 176 PPL dan THL                                                                              | 15 BPK, 176 PPL dan THL                                                                              |

### 3.3. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBER DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel seperti pada lampiran.

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan Tahun 2018 dana yang dibutuhkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Dinas Pangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan atas berbagai pertimbangan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bidang Dinas Pangan.

Semoga Renja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan

daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

